



Collaborative Governance in Realizing an Inclusive Village for Persons with Disabilities in Sidorejo Village

Andi Syamsul Muarib^{*1)}, Supardal²⁾

¹⁾²⁾ Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia

Ashar Abdillah

Universitas Muhammadiyah Sinjai
Sinjai, Indonesia

Email correspondence : andisham344@gmail.com*

Abstract

Purpose: This study aims to fill the gap between previous studies by integrating the Collaborative Governance process in the context of realizing an Inclusive Village for Persons with Disabilities in Sidorejo Village.

Methodology: This research used a qualitative approach, collecting data through observation, interviews, and documentation. The analysis process drew on Ansell and Gash's collaborative governance theory, which emphasizes the importance of direct dialogue, building trust, commitment to the process, shared understanding, and interim outcomes.

Findings: The research results show that the collaborative governance process in creating an inclusive village for people with disabilities in Sidorejo has been successful, but challenges remain in practice. Despite this, the Sidorejo Village Government's commitment remains strong, with support from a number of relevant actors.

Practical Implication: This research is expected to be a consideration for the Sidorejo village government and related actors in carrying out cross-sector collaboration to create an inclusive village.

Originality: This study confirms the application of collaborative governance in realizing inclusive villages in Sidorejo.

Keywords: Collaborative Governance, Inclusive Village

Paper type: Research Paper

***Collaborative Governance* dalam Mewujudkan Desa Inklusif bagi Penyandang Disabilitas di Kalurahan Sidorejo**

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah di antara studi-studi sebelumnya dengan mengintegrasikan proses *Collaborative Governance* dalam konteks mewujudkan Desa Inklusif bagi Penyandang Disabilitas di Kalurahan Sidorejo.

Desain/metodologi/pendekatan: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses analisis mengacu pada teori *collaborative governance* ansell dan gash yang menekankan pentingnya dialog langsung, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan hasil sementara.

Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* dalam mewujudkan desa inklusif bagi penyandang disabilitas di sidorejo telah berjalan dengan baik, namun dalam praktiknya masih terdapat tantangan. Meskipun demikian komitmen Pemerintah Kalurahan Sidorejo tetap kuat dengan adanya dukungan dari sejumlah aktor terkait.

Implikasi Praktis: Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah kalurahan sidorejo serta aktor terkait dalam melakukan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan desa inklusif.

Originalitas/Nilai: Penelitian ini menegaskan penerapan *collaborative governance* dalam mewujudkan desa inklusif di sidorejo.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Desa Inklusif.

Jenis Penelitian: Artikel Penelitian

PENDAHULUAN

Era tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks dan terbuka, konsep *Collaborative Governance* muncul sebagai pendekatan alternatif yang menekankan pentingnya kolaborasi. *Collaborative Governance* merupakan suatu konsep yang menekankan pada pentingnya kerja sama yang erat dan sinergis antara tiga pilar utama dalam tata kelola, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dalam upaya menciptakan kebijakan dan solusi yang lebih efektif serta berkelanjutan (Idris et al., 2022). Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai pembuat regulasi dan fasilitator yang memastikan bahwa kepentingan publik tetap terjaga, sementara sektor swasta memberikan kontribusi dalam bentuk inovasi, sumber daya, dan efisiensi dalam implementasi berbagai program. Di sisi lain, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam memberikan aspirasi, pengawasan, serta menjamin bahwa kebijakan yang ditetapkan sejatinya atas kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Dengan adanya kolaborasi yang harmonis di antara ketiga pilar tersebut, diharapkan mampu mendukung tata kelola yang lebih transparan, partisipatif, dan responsif terhadap tantangan sosial, ekonomi, serta lingkungan yang terus berkembang. Model ini juga sangat memungkinkan adanya distribusi peran dan tanggung jawab yang lebih merata sehingga menciptakan ekosistem yang saling mendukung dalam mencapai tujuan Bersama, baik dalam lingkup lokal dan nasional.

Penerapan *Collaborative Governance* di Indonesia semakin menemukan relevansinya, terutama dalam bidang pembangunan desa. Pembangunan di wilayah pedesaan atau pembangunan desa merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan nasional yang strategis, inklusif dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menguraikan bahwa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan Pembangunan di wilayah pedesaan, Indonesia membangun dari bawah. Maka desa akan merasakan kesejahteraan, kota akan berkembang dan negara akan semakin kuat (Republik Indonesia, 2024).

Hal ini tak lepas dari adanya desentralisasi terhadap desa, dimana desa diberikan kewenangan untuk mengelola Pembangunan sesuai potensi lokal. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, menguraikan bahwa, Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa (Republik Indonesia, 2020).

Kewenangan desa Menjadi peluang besar bagi masyarakat desa untuk tidak hanya menjadi objek, melainkan subjek pembangunan. Namun demikian, efektivitas pembangunan desa tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dan sumber daya, tetapi juga melalui proses perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan secara inklusif, partisipatif, dan kolaboratif. Banyak desa masih menghadapi tantangan dalam mengorganisasi masyarakat, menjembatani kepentingan beragam kelompok, dan membangun sinergi dengan aktor non-pemerintah. Karena itu, *Collaborative Governance* menjadi solusi terhadap tata kelola desa yang cenderung elitis dan kurang partisipatif. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan desa, konsep desa inklusif hadir sebagai gagasan normatif dan praksis yang bertujuan untuk menjamin bahwa tidak ada satu pun penduduk desa yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Desa inklusif dapat diartikan sebagai konsep pembangunan yang menekankan pada kesetaraan hak, akses, dan partisipasi kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk kelompok marginal khususnya Penyandang Disabilitas. Gagasan ini menempatkan desa sebagai ruang hidup yang mampu menghidupi semua warganya, dengan menghargai keberagaman sebagai kekuatan bersama. Desa Inklusif tidak hanya menjamin keterlibatan difabel dalam pengambilan keputusan publik, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan sosial secara setara. Dengan demikian, Desa Inklusif menjadi wujud nyata dari pembangunan yang berpusat pada semua kalangan termasuk Penyandang Disabilitas (Zulfikar, 2016).

Konsep Desa Inklusif telah mulai diimplementasikan di sejumlah wilayah di Indonesia salah satunya di Kalurahan Sidorejo, yang terletak di Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Kalurahan ini terdiri dari 14 padukuhan dengan jumlah penduduk sekitar 8.000 jiwa. Penyandang Disabilitas di Kalurahan Sidorejo pada awalnya tercatat 85 orang, tetapi setelah pendataan dilakukan secara komprehensif jumlahnya tercatat mencapai 360 orang (Murwaningsih & Wedjajati, 2021). Dengan jumlah Penyandang Disabilitas yang signifikan, maka diperlukan konsep desa yang rama akan penyandang disabilitas. *Collaborative Governance* yang terbangun antara Pemerintah Kalurahan Sidorejo dan SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) merupakan cikal bakal kalurahan sidorejo menjadi rintisan Desa Inklusif.

Penelitian ini mengacu pada sejumlah penelitian terdahulu, Pertama, Penelitian Oleh I Ketut Agus Swastika, Putu Nomy Yasintha dan I Ketut Winaya (2022) dengan judul *Collaborative Governance* dalam Pembangunan Desa Inklusif di Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari temuan yang

diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kolaborasi telah berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan delapan indikator yang digunakan, lima indikator menunjukkan hasil positif, yaitu komitmen terhadap tujuan bersama, kepercayaan antar peserta, akuntabilitas atau tanggung jawab yang terbagi, serta akses terhadap sumber daya. Sementara itu, tiga indikator lainnya struktur jaringan, tata kelola (governance), dan pertukaran informasi masih belum berjalan secara optimal. Adapun terkait indikator Desa Inklusif, pelaksanaannya sudah menunjukkan kemajuan yang baik, terlihat dari adanya partisipasi penuh masyarakat, ketersediaan layanan berbasis hak, kemudahan akses, serta tumbuhnya sikap inklusif di lingkungan desa (Swastika et al., 2022).

Kedua, Penelitian Oleh Ahmad Mutawakkilir Rohman dan Kamilia Hamidah dengan judul *Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pati*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Hukurilla, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan perencanaan program pembangunan desa inklusif telah berjalan dengan baik. Peningkatan jumlah sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung penerapan dan dinamika program pembangunan desa inklusif telah tercapai, meskipun masih dibutuhkan pendampingan lanjutan. Selain itu, langkah-langkah dalam mempersiapkan mitra melalui peningkatan pengetahuan dan pelatihan juga telah berjalan efektif, namun tetap memerlukan bimbingan secara berkelanjutan untuk hasil yang lebih optimal (Ahmad Mutawakkilir Rohman, 2024).

Ketiga, Penelitian Oleh Hary Priyanto dan Niko Pahlevi Hentika dengan judul *Collaborative Penta Helix Stakeholders dalam Pembangunan inklusi yang berkelanjutan: suatu diskursus mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pembangunan inklusif memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi penyandang disabilitas, karena membuka ruang partisipasi yang lebih luas dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan pembangunan. Meskipun dalam proses implementasinya masih ditemui sejumlah hambatan, tanggung jawab dan komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi patut diapresiasi. Melalui kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak seperti media massa, sektor swasta, institusi akademik, dan organisasi non-pemerintah, pemerintah telah berhasil menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan memberikan kemudahan akses serta pemahaman bagi penyandang disabilitas. Sinergi ini mendorong keterlibatan aktif penyandang disabilitas pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan hasilnya, sehingga pembangunan inklusif benar-benar dapat dirasakan secara adil

dan merata oleh seluruh kalangan masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini termarginalkan (Priyanto, 2024).

Keempat, Penelitian Oleh Natasya Dwi Nurmalita dan Ane Permatasari dengan judul *Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelompok Difabel Panti Asuhan Bina Siwi*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara Kalurahan Sendangsari dan kelompok penyandang disabilitas di Panti Asuhan Bina Siwi belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek struktur jaringan dan koordinasi antar stakeholder yang masih berjalan secara terpisah. Meski terdapat komitmen dan kepercayaan terhadap Panti Asuhan, hubungan antar pihak belum terjalin erat. Beberapa pihak seperti UNY, Inlue Indonesia, dan Dinas Sosial telah memiliki MoU, namun Kalurahan Sendangsari dan PT Ameya belum. Komunikasi masih lemah, ditandai dengan kurangnya koordinasi dan informasi yang sering menimbulkan miskomunikasi. Dukungan sumber daya manusia, dana, dan alat cukup memadai dari pihak eksternal, namun peran pemerintah desa masih pasif, padahal semestinya menjadi penggerak utama dalam mendorong kolaborasi yang inklusif (Nurmalita, 2023).

Kelima, Penelitian Oleh Mutrofin dan Ageng Widodo (2020) dengan judul *Kebijakan Pembangunan Desa Inklusif : Analisis Monitoring dan Evaluasi di Kalurahan Sidorejo Kulonprogo D. I. Yogyakarta*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa Monitoring dan evaluasi merupakan dua aspek yang wajib ada dalam pelaksanaan satu program, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun pihak swasta, karena keduanya berperan penting guna menjamin program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah diputuskan. Dalam konteks pembangunan desa inklusif, pendekatan ini memberikan peluang kepada masyarakat dalam memperoleh kehidupan yang lebih baik atau sejahtera. Peninjauan terhadap monitoring dan evaluasi desa inklusif di Kalurahan Sidorejo, Kulon Progo mencakup aspek data, informasi, dan partisipasi masyarakat, sedangkan evaluasinya melibatkan unsur akses layanan publik yang setara, keberadaan regulasi yang mendukung, perencanaan anggaran yang inklusif, serta permasalahan sosial yang ada di tengah masyarakat. (Widodo, 2020). Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi celah di antara studi-studi sebelumnya dengan mengintegrasikan pendekatan Collaborative Governance secara menyeluruh dalam konteks mewujudkan desa inklusif bagi penyandang disabilitas tepatnya di kalurahan sidorejo kapanewon lendah kabupaten kulon progo.

Penelitian ini difokuskan pada proses *Collaborative Governance* mengacu dari Ansell dan Gash (2008). Ansell dan Gash (2008) menjelaskan Collaborative Governance merupakan model tata kelola yang melibatkan pemangku kepentingan

secara aktif di luar batas pemerintahan atau negara. Pendekatan ini menekankan proses pengambilan keputusan kolektif yang didasarkan pada musyawarah dan konsensus, yang bertujuan untuk merumuskan atau melaksanakan kebijakan dan program publik. (Noor, Suaedi, 2022). Ansell dan Gash menekankan pentingnya dialog langsung, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan hasil sementara dalam mewujudkan Desa Inklusif. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi aktor terkait khususnya Pemerintah Kalurahan Sidorejo dalam melakukan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan Desa Inklusif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini, mengacu pada jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berpusat pada manusia yang menempatkan individu sebagai subjek utama dalam situasi sosial. Di sini, manusia dipandang sebagai makhluk otonom yang memiliki kebebasan untuk berpikir dan membuat keputusan berdasarkan latar belakang budaya dan sistem kepercayaan pribadinya. (Safrudin et al., 2023). Peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh informasi yang rinci dan mengumpulkan data secara akurat kaitannya dengan Collaborative Governance dalam Mewujudkan Desa Inklusif di Kalurahan Sidorejo. Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Sidorejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo pada bulan November 2025. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah; Lurah Sidorejo, Program Officer (PO) Program SOLIDER Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi (SIGAB) Indonesia, Ketua Forum Difabel Sidorejo (FDS), Tokoh Masyarakat Sidorejo dan Aparatur Pemerintah Kalurahan Sidorejo.

Penelitian ini menggunakan Sumber data yaitu, Data primer, Data sekunder dan Data tersier (Rukhmana, 2021). Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga Teknik yaitu, Wawancara, Observasi dan Dokumentasi untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian (Ardiansyah et al., 2023). Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam memilih informan dan narasumber (Ani et al., 2021). Penafsiran data melibatkan tiga tahap utama, (1) Dekonstruksi, yang melibatkan penguraian data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dengan meninjau transkrip wawancara atau catatan penelitian secara cermat dan mengkategorikan informasi ke dalam kode atau klasifikasi tertentu. (2) Interpretasi, yang melibatkan identifikasi persamaan dan perbedaan di antara topik, membandingkan temuan dengan penelitian sebelumnya, memeriksa teori yang dapat memperjelas hubungan antara tema, dan menganalisis hasil penelitian secara mendalam. (3) Rekonstruksi, yang terdiri dari reorganisasi kode dan tema yang signifikan, menyoroti hubungan timbal

baliknya, dan memberikan penjelasan yang lebih luas berdasarkan kerangka kerja teoritis dan perspektif yang relevan. (Waruwu, 2023).

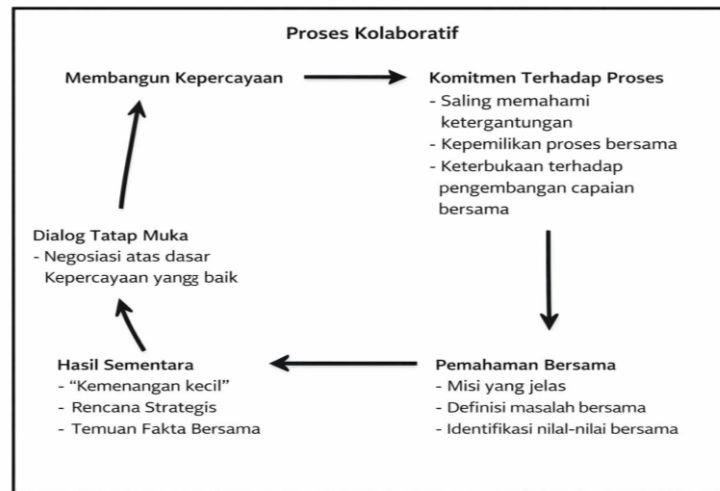
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah tidak hanya bergantung pada kapasitasnya sendiri dalam menjalankan kebijakan dan program. Keterbatasan kemampuan, sumber daya, dan jaringan pendukung mengharuskan adanya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga pemerintah lainnya, sektor swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat lokal. Dengan cara ini, dapat terjalin kerja sama yang kolaboratif untuk mencapai tujuan dari program atau kebijakan tersebut (Febrian, 2016). *Collaborative Governance* adalah jenis tata kelola di mana aktor publik dan swasta bekerja sama dengan cara yang khas, menggunakan proses tertentu, untuk menetapkan hukum dan peraturan untuk penyediaan barang publik (Ansell & Gash, 2007).

Selaras dengan itu Emerson (2011), menganggap bahwa *Collaborative Governance* didefinisikan sebagai model tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik secara partisipatif terhadap pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang terstruktur, kolektif, dan berdasarkan konsensus. Proses ini dapat bervariasi dalam cakupan dan kedalamannya, tetapi tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan atau menerapkan kebijakan publik dan mengelola program atau sumber daya publik secara kolaboratif (Martomo, 2017). Kurniadi (2020) memandang *Collaborative Governance* sebagai suatu proses yang mencakup pembentukan, pengarahan, fasilitasi, hingga pemantauan tata kelola organisasi lintas sektor dalam rangka menyelesaikan persoalan kebijakan pemerintah yang kompleks, yang tidak mampu diatasi hanya dengan lembaga pemerintah saja. Dengan kata lain, kolaborasi lintas sektor menjadi penting karena tantangan kebijakan publik sering kali melampaui kapasitas dan kewenangan organisasi publik, sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak di luar pemerintahan untuk menemukan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan (Qomariyah, 2023).

Menurut (Ansell & Gash, 2007), ada lima indikator yang saling terkait dalam proses kolaboratif. Berikut proses kolaboratif dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1. Proses kolaboratif



Sumber : Ansell dan Gash (2008)

Collaborative Governance dalam mewujudkan Desa Inklusif bagi Penyandang Disabilitas di Kalurahan Sidorejo diawali melalui dialog langsung antar aktor yang melibatkan Pemerintah Kalurahan Sidorejo, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia dan Kelompok Difabel Sidorejo. Dialog langsung antar aktor tersebut menjadi ruang komunikasi yang memungkinkan setiap aktor menyampaikan pandangan, kepentingan, serta gagasan secara terbuka dan setara. Melalui proses interaksi tersebut, kepercayaan antar aktor secara bertahap mulai terbangun dan menjadi penting dalam memperkuat hubungan kerja sama. Kepercayaan yang terbangun kemudian mendorong munculnya komitmen bersama untuk terus menjalankan proses kolaborasi secara berkelanjutan dalam upaya mewujudkan desa yang inklusif. Selanjutnya, komitmen tersebut memperkuat terbentuknya pemahaman bersama mengenai tujuan, peran, serta tanggung jawab masing-masing aktor dalam mendukung pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Proses kolaborasi yang berlangsung, pada akhirnya menghasilkan berbagai capaian atau hasil sementara, baik dalam bentuk meningkatnya penerimaan sosial masyarakat, keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan desa, maupun munculnya berbagai kebijakan yang mendukung terwujudnya Desa Inklusif di Kalurahan Sidorejo.

Dialog Langsung

Proses *Collaborative Governance* bersandar pada dialog langsung antar aktor. Dialog langsung merupakan tahapan awal dalam proses kolaborasi, dimana tahapan ini penting untuk membangun komunikasi yang intens, mengenali manfaat yang

dapat diperoleh, serta mengatasi asumsi dan kesenjangan pemahaman. Ansell dan Gash mengungkapkan bahwa walaupun dialog langsung tidak memberikan jaminan suksesnya kolaborasi, bahkan dapat menimbulkan konflik dan perbedaan kedudukan namun tanpa adanya dialog antar aktor sangat sulit untuk mewujudkan kolaborasi yang efektif.

Dialog langsung antar aktor menjadi penting sebagai tahapan awal kolaborasi dalam mewujudkan Desa Inklusif di Kalurahan Sidorejo. Pemerintah Kalurahan Sidorejo dengan sadar menangkap peluang tersebut, yang kemudian diperkuat dengan pendampingan intens dari SIGAB serta partisipasi aktif Kelompok Difabel Sidorejo. Keterlibatan tiga aktor tersebut, menunjukkan adanya proses dialog yang berjalan secara partisipatif dan kolaboratif. Dimana setiap aktor memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide, gagasan dan kepentingannya dalam mewujudkan desa yang dapat memenuhi dan melindungi hak-hak Penyandang Disabilitas.

SIGAB sebagai inisiator program Desa Inklusif mengawali dialog langsung tersebut, melalui audiensi dengan Pemerintah Kalurahan Sidorejo. Hal ini dilakukan untuk membangun pemahaman bersama antar aktor yang berkaitan dengan pentingnya mendorong desa yang ramah, adil dan inklusif bagi Penyandang Disabilitas. Melalui forum tersebut, Pemerintah Kalurahan Sidorejo, SIGAB dan Kelompok Difabel Sidorejo berupaya menyatukan visi dan tujuan, sehingga proses kolaborasi dapat berjalan secara terarah.

Kordinasi antar aktor juga dilakukan sebagai sarana untuk memastikan adanya kesiapan dan komitmen dalam pengembangan Desa Inklusif. Selain berfungsi sebagai Ruang komunikasi dan pertukaran informasi, kordinasi juga difungsikan sebagai media evaluasi yang berkaitan dengan kesiapan sumber daya, dukungan kebijakan dan keberlanjutan program. Karena itu, komitmen antar aktor terhadap proses kolaborasi semakin menguat, sehingga pengembangan Desa Inklusif di Sidorejo dapat berjalan dengan konsisten dan berkelanjutan.

Dialog langsung antar aktor juga terlihat dari adanya pertemuan rutin yang melibatkan SIGAB, Pemerintah Kalurahan Sidorejo dan Kelompok Difabel Sidorejo. Pertemuan ini menjadi sarana komunikasi, konsolidasi dan advokasi, serta berfungsi untuk memperkuat partisipasi Penyandang Disabilitas, memastikan keberlanjutan dialog, dan menjaga proses kolaborasi dalam rangka mewujudkan sidorejo sebagai Desa Inklusif. Dalam proses tersebut, Kelompok Difabel Sidorejo tidak hanya diposisikan sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang aktif dalam dialog atau pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak Penyandang Disabilitas dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka yang beragam secara langsung. Dimana Pemerintah Kalurahan Sidorejo yang kemudian diperkuat dengan pendampingan intens dari SIGAB telah membuka ruang dan

posisi yang setara bagi Penyandang Disabilitas untuk terlibat dalam berbagai kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut, Dialog Langsung antar aktor dapat dibagi menjadi tiga bentuk, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Dialog Langsung

No	Bentuk Dialog	Aktor
1.	Audiensi	Pemerintah Kalurahan Sidorejo, SIGAB dan Kelompok Difabel Sidorejo.
2.	Rapat Kordinasi	Pemerintah Kalurahan Sidorejo, SIGAB dan Kelompok Difabel Sidorejo.
3.	Pertemuan Rutin	Pemerintah Kalurahan Sidorejo, SIGAB dan Kelompok Difabel Sidorejo.

Sumber : Diolah tahun 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa, Bentuk Dialog langsung yang melibatkan Pemerintah Kalurahan Sidorejo, SIGAB dan Kelompok Difabel Sidorejo meliputi Audiensi, Rapat Kordinasi dan Pertemuan Rutin. Audiensi difungsikan sebagai sarana awal untuk mempertemukan aktor terkait dalam menyampaikan aspirasi, menyatukan persepsi dan membangun komunikasi. Selanjutnya, Rapat Kordinasi juga dilakukan untuk menyelaraskan sejumlah kepentingan dan membahas Langkah-langkah yang akan diambil secara bersama. Sementara itu, Pertemuan Rutin difungsikan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan interaksi antar aktor, sehingga komunikasi tetap terjalin dan proses kolaborasi tetap terjaga. Oleh karena itu, Dialog langsung sebagai tahap awal kolaborasi dalam mewujudkan Desa Inklusif di Kalurahan Sidorejo dapat dikatakan telah berjalan dengan baik melalui audiensi, kordinasi dan pertemuan rutin.

Membangun Kepercayaan

Kurangnya rasa percaya antar aktor kerap kali menjadi penghambat dalam proses *Collaborative Governance*. Kolaborasi tidak hanya memerlukan negosiasi, tetapi juga rasa percaya yang tinggi. Membangun kepercayaan antar aktor merupakan salah satu bagian dari keseluruhan proses kerja sama atau kolaborasi. Aktor yang terlibat dalam kolaborasi harus mampu menjalin kepercayaan sebelum mendorong pihak lain untuk mengambil resiko. Sejumlah literatur menyebutkan bahwa membangun kepercayaan membutuhkan waktu, sumber daya dan komitmen jangka

panjang. Apabila aktor yang terlibat tidak siap untuk itu, sebaiknya proses kolaborasi tidak dijalankan.

Kepercayaan Pemerintah Kalurahan Sidorejo terhadap SIGAB terlihat dari reputasi dan legitimasi kelembagaan yang dimiliki. Dimana SIGAB merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam memperjuangkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas. Visi dan tujuan lembaga tersebut dianggap sejalan dan mampu mendukung upaya Pemerintah Kalurahan Sidorejo dalam mewujudkan Desa Inklusif bagi Penyandang Disabilitas. Kepercayaan ini diperkuat dengan adanya pengakuan formal terhadap SIGAB sebagai lembaga yang diakui pemerintah dan memiliki jangkauan kerja yang luas. Hal ini dipandang sebagai modal utama yang dapat dipercaya dalam mewujudkan Desa Inklusif di Sidorejo.

Kepercayaan antar aktor kemudian dibangun melalui pendekatan langsung dan proses sosialisasi. Dimana SIGAB sebagai inisiator dan aktor pendamping, melakukan pendekatan kepada Pemerintah Kalurahan Sidorejo untuk menjalin hubungan yang baik, membangun kesepahaman dan merumuskan keinginan bersama dalam mendorong terwujudnya Desa Inklusif bagi Penyandang Disabilitas. Sosialisasi difungsikan untuk menanamkan pemahaman bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari masyarakat desa yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang dilakukan SIGAB untuk memperkuat kepercayaan antar aktor.

Selain itu, kepercayaan antar aktor juga dibangun melalui strategi pendampingan yang berkelanjutan. SIGAB menyadari bahwa pendampingan tidak dapat dilakukan secara permanen, sehingga diperlukan Kader atau Fasilitator Lokal yang berasal dari masyarakat setempat. Dimana Fasilitator Lokal tersebut berperan sebagai penghubung antara SIGAB, Pemerintah Kalurahan Sidorejo dan Kelompok Difabel Sidorejo. Fasilitator lokal tersebut juga berperan untuk memastikan keberlanjutan program apabila kehadiran SIGAB tidak lagi intensif. Hal ini tidak hanya membangun kepercayaan antar aktor, tetapi juga memperkuat kemandirian desa dalam mewujudkan Desa Inklusif di Sidorejo.

Sementara itu, Kepercayaan Kelompok Difabel Sidorejo terhadap program Desa Inklusif terbangun melalui kepedulian nyata dari Pemerintah Kalurahan Sidorejo. Kepedulian tersebut ditunjukkan melalui pelibatan Penyandang Disabilitas dalam berbagai kegiatan desa, sehingga Penyandang Disabilitas tidak hanya diposisikan sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang aktif dalam berbagai kegiatan. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberadaan serta peran Penyandang Disabilitas dalam berbagai kegiatan desa.

Kepercayaan tersebut juga diperkuat dengan adanya respon positif dari Pemerintah Kalurahan Sidorejo terhadap aspirasi yang disampaikan oleh Kelompok

Difabel Sidorejo. Sejumlah usulan yang disetujui menandakan adanya keterbukaan dan keseriusan Pemerintah Kalurahan Sidorejo dalam mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu kepercayaan antar aktor telah terbangun melalui Reputasi dan Legitimasi Kelembagaan, Pendekatan Langsung dan Sosialisasi, serta praktik dan pengalaman nyata yang dirasakan secara langsung oleh Penyandang Disabilitas.

Komitmen Terhadap Proses

Tingkat komitmen antar aktor memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan atau kegagalan *Collaborative Governance*. Komitmen tersebut memerlukan perubahan sikap yang signifikan, terutama bagi pihak yang merasa posisinya lebih tinggi. Untuk mencapai kolaborasi semua aktor harus siap menerima hasil musyawarah, meskipun hasil musyawarah tersebut tidak sesuai dengan pandangan mereka. Proses kolaborasi yang berlandaskan pada kesepakatan antar aktor memang mengurangi resiko, tetapi dinamika tawar-menawar tetap bisa membawa arah yang tak terduga. Karena itu, kepercayaan menjadi sangat penting, pemangku kepentingan harus yakin bahwa pandangan mereka dihargai dan prosedur yang digunakan adil dan transparan. Komitmen dan rasa memiliki dapat tumbuh seiring keterlibatan aktif.

Komitmen terhadap proses *Collaborative Governance* dalam mewujudkan Desa Inklusif bagi Penyandang Disabilitas di Sidorejo, telah berjalan melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh aktor terkait. Misalnya, terlihat dari komitmen Pemerintah Kalurahan Sidorejo yang fokus pada tiga aspek, yaitu kebijakan, alokasi anggaran dan pembinaan. Ketiga aspek tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan secara adil, partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas yang beragam. Pada aspek kebijakan, Pemerintah Kalurahan Sidorejo yang kemudian didampingi oleh SIGAB telah merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Keberadaan Peraturan Desa tersebut menjadi landasan hukum yang kuat dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di Sidorejo, sekaligus menunjukkan adanya keseriusan dari Pemerintah Kalurahan Sidorejo untuk memastikan bahwa upaya tersebut dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

Kemudian, pada aspek alokasi anggaran, Pemerintah Kalurahan Sidorejo telah mengalokasikan anggaran bagi Kelompok Difabel Sidorejo secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya dukungan nyata yang terintegrasi dalam perencanaan keuangan desa, sehingga berbagai program dalam mewujudkan Desa Inklusif bagi Penyandang Disabilitas di Sidorejo memiliki kepastian anggaran.

Sementara itu, pada aspek pembinaan, komitmen Pemerintah Kalurahan Sidorejo diwujudkan melalui berbagai bentuk dukungan, seperti pelatihan dan bantuan sosial. Meskipun demikian pada aspek pembinaan dalam praktiknya masih terdapat tantangan mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh Sebagian penyandang disabilitas. Namun pemerintah sidorejo tetap mengupayakan agar program-program tersebut dapat berjalan. Oleh karena itu, komitmen Pemerintah Kalurahan Sidorejo telah diwujudkan secara konkret melalui kebijakan, alokasi anggaran dan pembinaan bagi Penyandang Disabilitas.

Di sisi lain, Komitmen SIGAB sebagai bentuk kolaborasi dalam mewujudkan Desa Inklusif di Sidorejo ditunjukkan dengan mendorong pembentukan Kelompok Difabel Sidorejo. Pembentukan kelompok tersebut dianggap sebagai Langkah strategis untuk memastikan adanya ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas. Selain itu, SIGAB juga mendorong adanya perumusan dan penetapan Peraturan Desa tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas melalui pendekatan langsung dengan Pemerintah Kalurahan Sidorejo. Dalam konteks ini, SIGAB berupaya mengintegrasikan hak-hak Penyandang Disabilitas ke dalam sebuah kerangka kebijakan desa, sehingga keberadaan kebijakan tersebut dapat memperkuat posisi dan peran Kelompok Difabel Sidorejo.

Lebih lanjut, proses pendampingan yang dilakukan SIGAB tidak hanya berbentuk pemberian bantuan semata, melainkan lebih menekankan pada upaya pemberdayaan. Melalui pendampingan, pertemuan rutin dan penguatan peran fasilitator lokal, Kelompok Difabel Sidorejo didorong untuk mencapai kesetaraan, meningkatkan kapasitas dan mampu mengadvokasi kebutuhan dan kepentingannya secara mandiri. Sehingga Penyandang Disabilitas tidak lagi dipandang sebagai objek semata, melainkan sebagai subjek yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan desa.

Sementara itu, dari perspektif Kelompok Difabel Sidorejo, Komitmen Pemerintah Kalurahan Sidorejo dalam mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan Penyandang Disabilitas tercermin melalui berbagai program nyata yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian. Program yang dimaksud berupa pemberian modal usaha untuk kegiatan ekonomi produktif, seperti angkringan dan toko kelontong. Program tersebut dirancang agar Penyandang Disabilitas memiliki sumber penghidupan yang mandiri, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan mengingat kebutuhan Penyandang Disabilitas yang beragam. Meskipun demikian, Pemerintah Kalurahan Sidorejo tetap berupaya agar program-program tersebut dapat berjalan sebagai mana mestinya. Selain dukungan modal usaha, Pemerintah Kalurahan Sidorejo juga memberikan bantuan sosial berupa sembako dan ternak ayam. Upaya tersebut menunjukkan adanya

perhatian dari Pemerintah Kalurahan Sidorejo terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan ekonomi Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan uraian tersebut, Komitmen antar aktor terhadap proses kolaborasi dapat di petakan sebagai berikut :

Tabel 2. Komitmen Terhadap Proses

No	Aktor	Bentuk Komitmen
1.	Pemerintah Kalurahan Sidorejo	Menyusun dan Menetapkan Peraturan Desa, Mengalokasikan Anggaran, Melakukan Pembinaan, Menyediakan Sarana Pendukung dan Bantuan Sosial.
2.	SIGAB	Melakukan Pendampingan, Mendorong Perumusan dan Penetapan Peraturan Desa, Mendorong Pembentukan Kelompok Difabel Sidorejo serta Memfasilitasi Fasilitator Lokal.
3.	Kelompok Difabel Sidorejo	Berpartisipasi Aktif dalam Berbagai Program dan Kegiatan.

Sumber : Diolah tahun 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa setiap aktor memberikan komitmen yang berbeda-beda sesuai peran dan kapasitasnya dalam mendukung program yang ada. Bentuk komitmen yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan Sidorejo seperti Menyusun dan Menetapkan Peraturan Desa, Mengalokasikan Anggaran, Melakukan Pembinaan, Menyediakan Sarana Pendukung dan Bantuan Sosial. Selanjutnya bentuk komitmen SIGAB sebagai aktor pendamping seperti Melakukan Pendampingan, Mendorong Perumusan dan Penetapan Peraturan Desa, Mendorong Pembentukan Kelompok Difabel Sidorejo serta Memfasilitasi Fasilitator Lokal. Sementara itu, bentuk komitmen yang diberikan oleh Kelompok Difabel Sidorejo berupa Partisipasi Aktif dalam berbagai Program dan Kegiatan. Oleh karena itu, komitmen antar aktor sebagai bagian kolaborasi telah dibuktikan melalui berbagai upaya demi mewujudkan sebuah Desa yang Iklusif bagi Penyandang Disabilitas di Sidorejo.

Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama memerlukan kesepahaman visi dan tujuan kolaborasi. Ansell dan Gash mengartikan pemahaman bersama sebagai upaya untuk memperoleh kesepakatan terhadap visi, tujuan dan arah yang jelas. Hal ini berupa

persetujuan atas definisi masalah dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengahadapinya. Definisi masalah bersama menunjukkan adanya kesepakatan atas kondisi yang dihadapi, yang harus disetujui oleh semua aktor yang terlibat. Proses ini penting untuk mengenali atau menentukan nilai-nilai bersama. Tanpa kesepakatan terhadap masalah utama yang akan dihadapi, sulit bagi para aktor untuk menemukan Solusi jangka panjang.

Pemahaman bersama sebagai bagian dari proses kolaborasi dalam mewujudkan Desa Inklusif di Sidorejo merupakan salah satu indikator penting yang tidak dapat diabaikan. Pemerintah Kalurahan Sidorejo memandang bahwa pemahaman yang dibangun bersama aktor terkait harus berangkat dari kesamaan visi dan tujuan, yaitu mewujudkan desa yang mampu menjamin kesetaraan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Kesamaan visi dan tujuan tersebut tidak hanya tercermin dalam perencanaan kebijakan, tetapi juga diwujudkan melalui praktik nyata dalam berbagai kegiatan yang menunjukkan keberpihakan terhadap isu inklusivitas.

Pemahaman bersama mengenai konsep dan tujuan Desa Inklusif telah dibangun sejak awal melalui proses sosialisasi yang dilakukan oleh SIGAB kepada Pemerintah Kalurahan Sidorejo dan Kelompok Difabel Sidorejo. Melalui sosialisasi tersebut, SIGAB menjelaskan tujuan besar pengembangan Desa Inklusif, arah capaian yang ingin diwujudkan, serta langkah-langkah strategis yang akan dijalankan. Proses ini dimaksudkan agar seluruh aktor memiliki kerangka berpikir yang sama, khususnya mengenai pentingnya kemandirian dan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagai prinsip utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program Desa Inklusif di Sidorejo.

Selain sosialisasi, pemahaman bersama juga diperkuat melalui pelatihan dan kegiatan berskala besar yang menghadirkan pengalaman langsung bagi masyarakat, salah satunya adalah penyelenggaraan Temu Inklusi Nasional di Kalurahan Sidorejo. Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan penyandang disabilitas dari berbagai daerah di Indonesia dan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat desa. Para peserta ditempatkan di 14 padukuhan tanpa adanya diskriminasi maupun penolakan dari warga setempat, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai inklusivitas telah mulai terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Interaksi langsung tersebut membuka pola pikir masyarakat bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi, kemampuan, dan daya untuk mandiri, sekaligus membantu mengurangi stigma negatif yang selama ini melekat.

Seiring dengan proses tersebut, Desa Inklusif dipahami sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga desa, termasuk penyandang disabilitas, tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Penyandang disabilitas diposisikan setara dengan warga desa lainnya, baik dalam kehidupan sosial

maupun dalam struktur dan kelembagaan desa. Kehadiran SIGAB mendorong terbentuknya Kelompok Difabel Sidorejo yang memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga desa lainnya, sehingga keberadaan dan peran penyandang disabilitas menjadi lebih jelas dan diakui.

Berdasarkan uraian tersebut, Pemahaman Bersama dibangun melalui sejumlah proses, antara lain sebagai berikut :

Tabel 3. Pemahaman Bersama

No	Proses Pemahaman Bersama	Aktor
1.	Sosialisasi	Pemerintah Kalurahan Sidorejo, SIGAB dan Kelompok Difabel Sidorejo.
2.	Pelatihan	Pemerintah Kalurahan Sidorejo, SIGAB dan Kelompok Difabel Sidorejo.
3.	Temu Inklusi	Pemerintah Kalurahan Sidorejo, SIGAB, Kelompok Difabel Sidorejo dan Masyarakat.

Sumber : Diolah tahun 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa, proses pemahaman Bersama yang melibatkan Pemerintah Kalurahan Sidorejo, SIGAB, Kelompok Difabel Sidorejo dan Masyarakat dilakukan melalui beberapa tahap. Sosialisasi dan Pelatihan dilakukan untuk memberikan pemahaman, meningkatkan kapasitas dan menyatukan persepsi yang berkaitan dengan pentingnya Desa Inklusif. Sementara itu, Temu Inklusi melibatkan aktor yang lebih luas menjadi penting dalam mendorong penerimaan sosial dan memperkuat pelaksanaan Desa Inklusif. Dengan demikian, pemahaman bersama antara Pemerintah Kalurahan Sidorejo, SIGAB, Kelompok Difabel Sidorejo, dan masyarakat terbentuk melalui kombinasi sosialisasi, pelatihan, serta praktik nyata Temu Inklusi. Proses ini menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi dalam mewujudkan Desa Inklusif di Sidorejo tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan dan program, tetapi juga oleh perubahan cara pandang, penerimaan sosial, dan komitmen bersama yang terus tumbuh di tingkat desa.

Hasil Sementara

Pada tahap ini, diperlukan pencapaian yang menunjukkan keberhasilan sementara dari kolaborasi. Hasil ini dapat berperan dalam menghidupkan kembali proses kolaborasi, mendorong terbentuknya kepercayaan dan komitmen yang lebih

kuat. Hasil awal ini juga dapat menjadi landasan untuk melanjutkan dan menyempurnakan proses kolaborasi ke depan.

Capaian utama dari penerapan Desa Inklusif di Sidorejo ditunjukkan melalui adanya perubahan sikap dan penerimaan sosial masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas. Stigma dan rasa malu yang sebelumnya melekat, baik dari lingkungan sosial maupun dari keluarga Penyandang Disabilitas itu sendiri, kini berangsur berkurang secara signifikan. Penyandang Disabilitas yang sebelumnya enggan atau bahkan dilarang terlibat dalam pertemuan RT maupun kegiatan desa lainnya, saat ini telah mampu berpartisipasi secara aktif tanpa rasa canggung maupun perlakuan diskriminatif. Kondisi ini mencerminkan terjadinya perubahan sosial yang penting, yakni meningkatnya kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian yang setara dalam kehidupan desa.

Keberhasilan tersebut juga tercermin melalui meningkatnya pembauran antara Penyandang Disabilitas dan Non-Penyandang Disabilitas dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti gotong royong. Penyandang Disabilitas turut ambil bagian sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki, sehingga jarak antara kelompok mayoritas dan minoritas semakin berkurang. Di samping itu, Pemerintah Kalurahan Sidorejo juga mendorong kemandirian Penyandang Disabilitas melalui pemberian hibah atau bantuan yang dapat dikelola secara mandiri dan disesuaikan dengan potensi masing-masing penerima manfaat. Upaya ini menunjukkan bahwa keberhasilan Desa Inklusif tidak hanya dilihat dari perubahan sosial, tetapi juga dari meningkatnya pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas.

Hasil sementara dari program Desa Inklusif di Sidorejo antara lain ditandai dengan terbentuknya Kelompok Difabel Sidorejo sebagai wadah kolektif bagi Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Kehadiran kelompok ini memperkuat posisi Penyandang Disabilitas dalam berbagai aktivitas desa karena mereka memiliki ruang yang lebih jelas untuk berpartisipasi dan menyampaikan kebutuhan secara terorganisir. Selain itu, Penyandang Disabilitas juga mulai dilibatkan dalam proses perencanaan dan penganggaran desa, seperti dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, yang mendorong adanya alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Lebih lanjut, Pemerintah Kalurahan Sidorejo yang didampingi oleh SIGAB telah merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa tentang Penyandang Disabilitas sebagai dasar hukum dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti proses rekrutmen perangkat desa. Dengan demikian, hasil sementara program Desa Inklusif tidak hanya ditunjukkan melalui keberadaan kebijakan, tetapi juga melalui terbukanya ruang kesetaraan dan partisipasi yang lebih luas bagi Penyandang Disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan desa.

Penerapan Desa Inklusif di Kalurahan Sidorejo juga memberikan manfaat nyata bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam hal kenyamanan mengakses ruang publik dan pelayanan desa. Penyandang Disabilitas yang sebelumnya jarang datang ke balai desa kini merasa lebih terbuka, aman, dan tidak lagi ragu untuk berinteraksi dengan Pemerintah Kalurahan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pelayanan publik di Sidorejo semakin ramah dan inklusif.

Secara keseluruhan, program Desa Inklusif turut mendorong perubahan perspektif dan sikap Pemerintah Kalurahan Sidorejo serta masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang terpinggirkan, melainkan sebagai warga desa yang setara dengan hak, potensi, dan peran yang perlu dihargai. Oleh karena itu, Desa Inklusif tidak hanya berdampak pada aspek kebijakan dan program, tetapi juga pada terbentuknya perubahan cara pandang dan hubungan sosial yang lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan menunjukan bahwa *Collaborative Governance* dalam mewujudkan Desa Inklusif bagi Penyandang Disabilitas di Sidorejo telah berjalan sesuai Ansell dan Gash. Pertama, Dialog Langsung antar aktor yang melibatkan SIGAB, Pemerintah Kalurahan Sidorejo dan Kelompok Difabel Sidorejo, sebagai proses awal kolaborasi telah berjalan dengan baik. Dimana Dialog Langsung antar aktor tersebut diwujudkan melalui Audiensi pada tahap awal, Rapat Koordinasi dan Pertemuan Rutin secara berkala. Kedua, Kepercayaan antar aktor sebagai bagian dari proses kolaborasi telah terbangun dengan baik. Dimana Kepercayaan antar aktor tersebut dibangun melalui pendekatan langsung, sosialisasi dan strategi pendampingan yang berkelanjutan dengan melibatkan fasilitator lokal, serta reputasi dan legitimasi kelembagaan. Ketiga, Sejumlah aktor yang terlibat telah menunjukan berbagai upaya sebagai bentuk komitmen terhadap proses kolaborasi. Pemerintah Kalurahan Sidorejo memperlihatkan komitmennya melalui Regulasi, Alokasi Anggaran dan Pembinaan. Meskipun demikian pada aspek pembinaan dalam praktiknya masih terdapat tantangan mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh Sebagian penyandang disabilitas. Komitmen SIGAB sebagai aktor pendamping diwujudkan melalui pendampingan, advokasi kebijakan dan penguatan kelembagaan. Sedangkan Komitmen Kelompok Difabel Sidorejo ditunjukan melalui keterlibatannya dalam berbagai kegiatan.

Keempat, Pemahaman bersama antar aktor kaitannya dengan konsep Desa Inklusif di Sidorejo telah terbangun dengan baik. Dimana pemahaman tersebut dibangun melalui sosialisasi, pelatihan, dan praktik nyata pada kegiatan Temu Inklusi Nasional di Sidorejo. Kelima, Hasil Sementara dari proses kolaborasi ditunjukan dengan adanya perubahan sosial yang signifikan, berkurangnya

stigma dan pembatasan ruang partisipasi, penguatan kelembagaan melalui pembentkan Kelompok Difabel Sidorejo serta adanya dukungan Regulasi dan Alokasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang terbangun telah memberikan dampak positif dan menjadi pondasi awal dalam mewujudkan Desa Inklusif. Maka dari itu, proses *Collaborative Governance* di sidorejo telah mencerminkan keterkaitan yang utuh antara dialog langsung, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan hasil sementara dalam mewujudkan Desa inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

Adapun keterbatasan dari penelitian ini yaitu Terbatasnya literatur atau penelitian terdahulu tentang *Collaborative Governance* dalam konteks mewujudkan Desa inklusif bagi Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperkaya referensi dengan mengkaji lebih banyak literatur atau penelitian terdahulu terkait *Collaborative Governance* dalam konteks mewujudkan Desa inklusif bagi Penyandang Disabilitas baik di tingkat nasional maupun internasional.

IMPLIKASI PRAKTIS DAN TEORITIS

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan implikasi praktis dan teoritis, antara lain sebagai berikut:

Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam Mewujudkan Desa Inklusif di Sidorejo telah berjalan dengan baik. Melalui Dialog Langsung seperti audiensi, rapat kordinasi dan pertemuan rutin kepercayaan antar aktor semakin meningkat. Kepercayaan antar aktor tidak hanya diperoleh dari adanya dialog, tetapi juga diperoleh dari sosialisasi, strategi pendampingan serta reputasi dan legitimasi kelembagaan. Pemerintah Kalurahan Sidorejo perlu memastikan komitmennya melalui dukungan regulasi, penganggaran dan pembinaan yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Di satu sisi, peran SIGAB sebagai aktor pendamping sangat penting dalam proses advokasi kebijakan dan penguatan kelembagaan. Partisipasi Kelompok Difabel Sidorejo juga perlu terus di dorong, agar tidak hanya menjadi objek semata, melainkan sebagai subjek pembangunan.

Implikasi Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini memperkuat relevansi teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, khususnya keterkaitan antara

dialog langsung, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses serta pemahaman bersama untuk mencapai hasil sementara. Tahapan-tahapan tersebut tidak hanya terjadi secara linier tetapi juga saling menguatkan secara simultan. Peran antar aktor menjadi penting, khususnya peran aktor pendamping seperti SIGAB dalam menjembatani kepentingan kelompok rentan. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan pemahaman teoritis bahwa kolaborasi dalam konteks desa inklusif tidak hanya ditentukan oleh struktur formal melainkan juga oleh strategi pendampingan.

REFERENSI

- Ahmad Mutawakkilir Rohman, K. H. (2024). Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pati. *Al-I'timad: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(2), 137–154. <https://doi.org/10.35878/alitimad.v2i2.1362>
- Ani, J., Lumanauw, B., & Tampenawas, J. L. A. (2021). Pengaruh Citra Merek, Promosi Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada E-Commerce Tokopedia Di Kota Manado the Influence of Brand Image, Promotion and Service Quality on Consumer Purchase Decisions on Tokopedia E-Commerce in Manado. *663 Jurnal EMBA*, 9(2), 663–674.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi). *Jurnal Kajian Pemerintah*, II, 200–208. <http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824> diakses pada tanggal 5 April 2019 pukul 02:55 WIB
- Idris, I., Herdiana, D., & Mujtahid, I. M. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 9810–9819. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3269>
- Martomo, Y. P. (2017). *Collaborative Governance Sebagai Basis Pengelolaan Public Affairs* (F. Wartoyo (ed.); Pertama). Yuma Pustaka.
- Murwaningsih, S., & Wedjajati, R. S. (2021). Penerimaan Masyarakat Kepada Penyandang Disabilitas (Studi Desa Inklusi Peduli dengan Kelompok Rentan di Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo). *Sosio Progresif: Media Pemikiran Studi Pembangunan Sosial*, 1(1), 41–57.
- Noor, Suaedi, M. (2022). Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik. In M. R. F. dan F. Z. Yopiannor (Ed.), *BILDUNG* (Pertama, Vol. 12, Issue 1). BILDUNG. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng->

- 8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciur
beco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SI
STEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Nurmalita, P. (2023). *Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelompok Difabel Panti Asuhan Bina Siwi Di Kalurahan* 9(2).
<https://doi.org/10.14710/jiip.v9i2.19107>
- Priyanto, H. (2024). Collaborative Penta Helix Stakeholders Dalam Pembangunan Inklusi Yang Berkelanjutan; Suatu Diskursus Mencapai Keadilan Dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas. *Majalah Ilmiah "DIAN ILMU,"* 24(1), 37–48. <https://doi.org/2620-7451> I.
- Qomariyah, E. (2023). *Collaborative Governance* (M. I. Bisri (ed.); Pertama). SELARAS MEDIA KREASINDO.
- Republik Indonesia. (2020). *PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.*
- Republik Indonesia. (2024). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA* (pp. 1–11).
- Rukhmana, T. (2021). MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN: PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER. *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2(2), 28–33.
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- Swastika, K., Yasintha, P., & Winaya, K. (2022). Collaborative Governance dalam Pembangunan Desa Inklusif di Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. *Universitas Udayana*, 1–5.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 99–113.
<https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>
- Widodo, A.-. (2020). Kebijakan Pembangunan Desa Inklusif: Analisis Monitoring dan Evaluasi di Kelurahan Sidorejo, Kulonprogo D.I Yogyakarta. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(2), 40.
<https://doi.org/10.24235/empower.v5i2.7157>
- Zulfikar, F. (2016). Partisipasi Kaum Difabel Dalam Pembangunan Desa Inklusi (Studi Kasus Desa Sidorejo Dan Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo). *Repository UMY*, 1–27.